



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)**

SKRIPSI

Rahma Purnomo Rini

1302025194

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)**

SKRIPSI

Rahma Purnomo Rini

1302025194

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA
2017

PERNYATAAN ORSINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)**” merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak menyantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain sebelumnya atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 1 Desember 2017

Yang Menyatakan,



Rahma Purnomo Rini
NIM. 1302025194

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)**

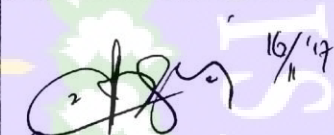
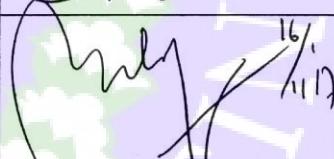
NAMA : **RAHMA PURNOMO RINI**

NIM : **1302025194**

PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2017**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Fitrisia, S.E., M.Si., AK., CA	 16/11/17
Pembimbing II	Mulyaning Wulan, S.E., M.AK	 16/11/17

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



(Daran Heriansyah, S.E., M.Si)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini dengan judul :

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)

Yang disusun oleh :
Rahma Purnomo Rini
1302025194

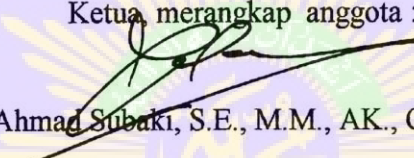
Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA


Pada tanggal : 1 Desember 2017

Tim Penguji :

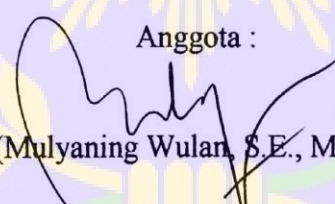
Ketua, merangkap anggota :


(H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., AK., CA, CPAI)

Sekretaris, merangkap anggota :


(Sumardi, S.E., M.Si)


Anggota :



(Mulyaning Wulan, S.E., M.AK)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Daram Heriansyah, SE., M.Si


Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

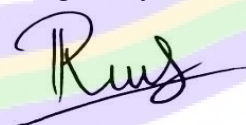
Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Purnomo Rini
NIM : 1302025194
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Desember 2017
Yang Menyatakan,



(Rahma Purnomo Rini)
NIM. 1302025194

ABSTRAKSI

Rahma Purnomo Rini (1302025194)

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA BANTEN)

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Kata Kunci : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilihat dari hasil temuan audit kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidapatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari *website* Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidapatuhan pada ketentuan perundang-undangan, variabel dependennya adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Teknik pengolahan data menggunakan *Software SPSS 23*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikasinya sebesar $0,029 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,300 > t$ tabel $2,052$. Variabel ketidapatuhan pada ketentuan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi $0,173 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,398 < t$ tabel $2,052$. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidapatuhan pada ketentuan perundang-undangan secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi $0,024 < 0,05$ dan nilai f hitung $4,308 > f$ tabel $3,354$.

Sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat di lihat dengan nilai *Adjusted R Square (Adjusted R2)* sebesar 0,186 yang artinya adalah 18,6% variabel dependen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan sisanya 81,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini, seperti aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten/Kota Banten memberikan pengendalian yang efektif untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik, kemudian mengadakan sosialisasi dan *review* terhadap ketentuan perundang-undangan dan juga pelaksanaannya untuk mengurangi adanya ketidakpatuhan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan melakukan pengawasan internal agar sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan menjadi lebih baik.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan menambahkan variabel yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, adapun variabel yang disarankan seperti, aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemerintah daerah.

ABSTRACT

Rahma Purnomo Rini (1302025194)

INFLUENCE OF AUDITING AND FINANCIAL CONTROL ON THE PERFORMANCE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT (EMPIRICAL STUDY IN BANTEN DISTRICT/CITY)

Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Keywords: Weakness of Internal Control System, Non-Compliance on the term Legislation with Performance Implementation of Local Government.

This study purposed to know the effect of auditing and financial control from The Financial Auditing Agency which is viewed from audit findings of weaknesses of internal control system and non-compliance on the term legislation on the performance implementation of local government in Banten District /City.

This study uses secondary data obtained from the website of the Financial Auditing Agency and Ministry of Internal Affairs. Independent variables used in this research are weakness of internal control system and non compliance on the term legislation its dependent variable is performance implementation of local government. Data processing techniques using Software SPSS 23.

The results of this study indicate that the weakness of the internal control system has an influence on the performance of local government implementation, it is proved by the significance level of $0.029 < 0.05$ and the value of t arithmetic $2.300 > t$ table 2.052. Variable non-compliance with statutory provisions has no effect on the performance of local government administration it can be proven with significance level $0,173 > 0,05$ and t value $1,398 < t$ table 2,052. Influence of weakness of internal control system and non-compliance to the provisions of legislation simultaneously to the performance of local government administration with a significance level of $0.024 < 0.05$ and the value of f arithmetic $4.308 > f$ table 3.354. While the ability of independent variable in explaining the dependent variable in this research can be seen with Adjusted R Square (Adjusted R²) value of 0.186 which means is 18.6% dependent variable performance of local

government administration explained by independent variable weakness of internal control system and non-compliance with the provisions legislation and the remaining 81.4% are explained by other variables outside of this study, such as financial aspects, audit opinion, independence level and regional size.

Based on the above explanation, the researcher gives suggestions for the Government of District/City of Banten to provide effective control to achieve better performance of local government administration, then to socialize and review the legislation and also its implementation to reduce the non-compliance of legislation so that it will increase performance of local government administration and internal supervision so that the system of internal control and compliance to the provisions of the legislation is better.

It is expected that the next researcher will add the samples to make the research more accurate and add the variables that affect the performance of local government administration, as for the suggested variables such as financial aspect, audit opinion, independence level and size of local government.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Banten)”** penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, saudara-saudaraku tersayang atas do’a dan bantuan yang tulus ikhlas, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun dalam penyusunannya. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Thohirin, S.H.I., M.Pd.i., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Fitriasia, S.E., M.Si., AK., CA sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Mulyaning Wulan, S.E., M.AK sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
10. Sahabat-sahabat yang selalu setia membantu, menemani, dan mendukung penulis dalam menjalani laporan hasil magang ini dari awal sampai akhir selesainya laporan hasil magang ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis S1 angkatan 2013.

Dengan kerendahan hati penulis tidak sanggup membalas budi baiknya, semoga amal baik Bapak/Ibu sekalian akan mendapatkan balasan yang mulia dan bermanfaat dari Allah SWT, Amin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Akademik dan Mahasiswa, serta menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jakarta, 16 November 2017

Penulis,



Rahma Purnomo Rini

NIM 1302025194

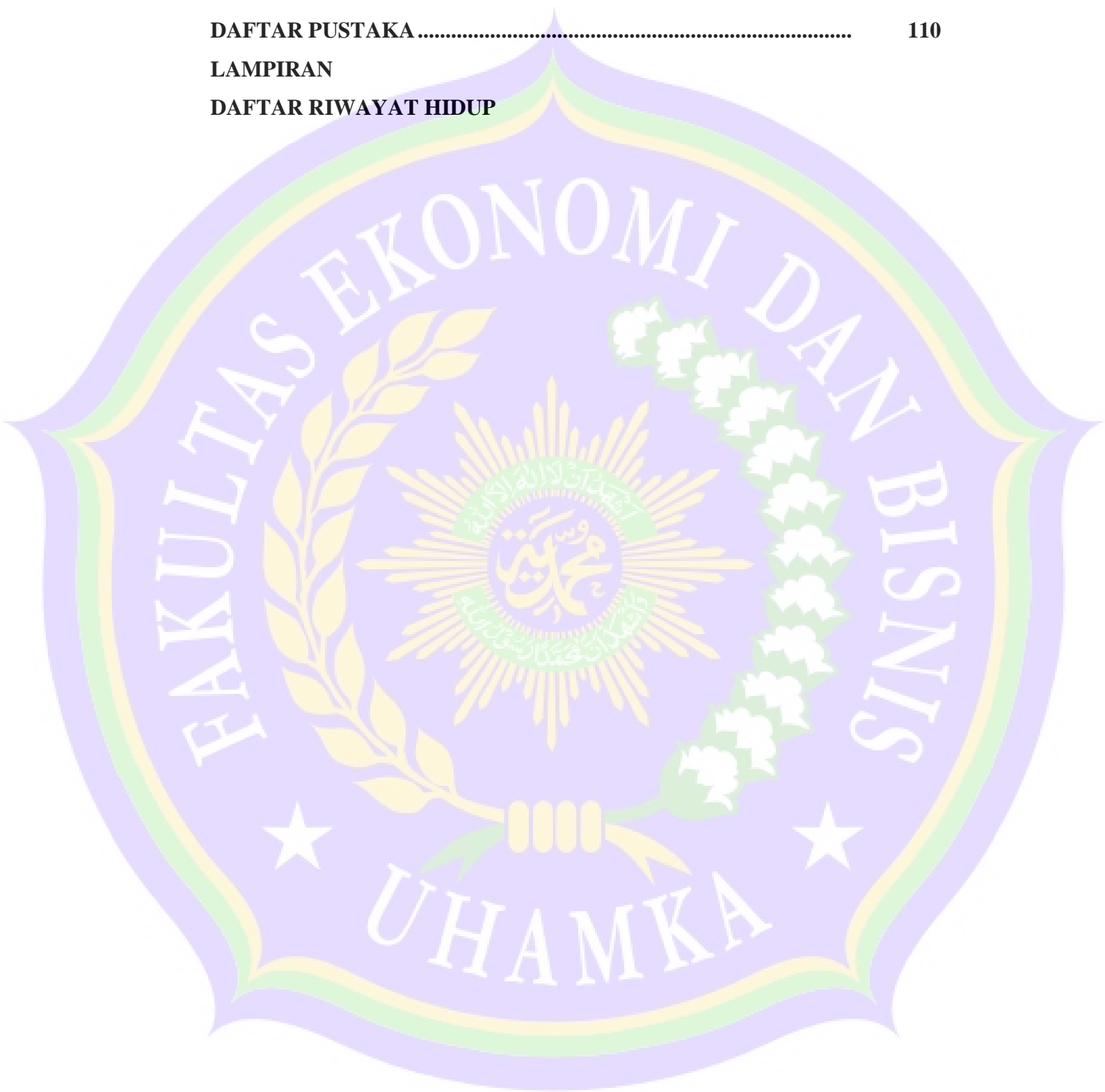
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORSINILITAS.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	4
1.2.3 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Telaah Pustaka	28
2.2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	28
2.2.1.1 Pengertian Kinerja Pemerintah	28
2.2.1.2 Pengukuran Kinerja.....	29

2.2.1.3	<i>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....</i>	30
2.2.2	<i>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....</i>	30
2.2.3	<i>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....</i>	31
2.2.4	<i>Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).....</i>	33
2.2.5	<i>Pemeriksaan.....</i>	35
2.2.5.2	<i>Pengertian Pemeriksaan.....</i>	35
2.2.5.2	<i>Tujuan Pemeriksaan.....</i>	36
2.2.5.3	<i>Jenis-jenis Pemeriksaan.....</i>	37
2.2.6	<i>Pengawasan Keuangan.....</i>	37
2.2.6.1	<i>Pengertian Pengawasan Keuangan.....</i>	37
2.2.6.2	<i>Tujuan Pengawasan.....</i>	38
2.2.6.3	<i>Jenis-jenis Pengawasan.....</i>	39
2.2.7	<i>Sistem Pengendalian Intern.....</i>	39
2.2.7.1	<i>Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....</i>	39
2.2.7.2	<i>Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....</i>	41
2.2.8	<i>Kepatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan.....</i>	41
2.2.9	<i>Temuan Audit.....</i>	42
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Hipotesis.....</i>	45
2.4	<i>Rumusan Hipotesis.....</i>	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metode Penelitian.....</i>	49
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel.....</i>	49
3.3	<i>Populasi dan Sampel.....</i>	52
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data.....</i>	54
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian.....</i>	54
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data.....</i>	54
3.5	<i>Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....</i>	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian.....</i>	59
4.1.1	<i>Lokasi Penelitian.....</i>	59

4.1.2	<i>Sejarah Singkat Provinsi Banten</i>	60
4.1.3	<i>Profil Singkat Kabupaten/Kota Banten</i>	60
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	63
4.2.1	<i>Data Penyajian</i>	63
4.2.1.1	<i>Perolehan Jumlah Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>	63
4.2.1.2	<i>Perolehan Jumlah Kasus Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan</i>	68
4.2.1.3	<i>Perolehan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	74
4.2.2	<i>Analisis Akuntansi</i>	77
4.2.2.1	<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	77
4.2.2.2	<i>Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	83
4.2.2.3	<i>Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	88
4.2.3	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	91
4.2.4	<i>Analisis Regresi Berganda</i>	93
4.2.5	<i>Analisis Asumsi Klasik</i>	94
4.2.5.1	<i>Uji Normalitas</i>	94
4.2.5.2	<i>Uji Multikolinieritas</i>	96
4.2.5.3	<i>Uji Heteroskedastisitas</i>	96
4.2.5.4	<i>Uji Autokorelasi</i>	97
4.2.6	<i>Pengujian Hipotesis</i>	99
4.2.6.1	<i>Uji Koefisien Determinasi R²</i>	99
4.2.6.2	<i>Uji T (Uji koefisien Regresi secara parsial)</i>	101
4.2.6.3	<i>Uji F (Uji koefisien secara simultan)</i>	102
4.3	Interpretasi.....	103
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	107

5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
2.	Kriteria Skor Pemda.....	30
3.	Kriteria Jumlah Kasus	45
4.	Operasional Variabel.....	51
5.	Pemilihan Sampel.....	53
6.	Daftar Sampel Penelitian.....	54
7.	Kriteria Jumlah Kasus Temuan.....	64
8.	Perhitungan Jumlah Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	64
9.	Hasil Jumlah Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.....	66
10.	Kriteria Jumlah Kasus Temuan Kriteria Skor Pemda.....	69
11.	Perhitungan Jumlah Kasus Ketidapatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan Kriteria Skor Pemda.....	69
12.	Hasil Jumlah Kasus Ketidapatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan	71
13.	Kriteria Skor Pemda.....	74
14.	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD).....	75
15.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	78
16.	Ketidapatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	83
17.	Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan pada Ketentuan Perundang-undangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	89
18.	Statistik Deskriptif Kriteria Skor Pemda	91
19.	Regresi Linier Berganda	93
20.	Uji Normalitas.....	95
21.	Uji Multikolinieritas.....	96
22.	Uji Autokorelasi	99

23. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	100
24. Uji T (Uji koefisien regresi secara parsial)	101
25. Uji F (Uji koefisien regresi secara bersama-sama)	102



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Hipotesis.....	47
2.	Grafik Normal P-P Plot Of Regresion Standarized Residual.....	94
3.	Hasil Metode Scatterplot.....	97
4.	Daerah Pengujian Durbin-Watson	98

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Hasil Output SPSS 23	1/14
2.	Tabel t	4/14
3.	Tabel f	5/14
4.	Tabel Durbin-Watson.....	6/14
5.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	7/14
6.	Formulir Pangajuan Persetujuan Skripsi.....	8/14
7.	Surat Tugas.....	9/14
8.	Catatan Konsultasi Dosen pembimbing I.....	10/14
9.	Catatan Konsultasi Dosen pembimbing II	11/14
10.	Data Variabel X1, X1 dan Y	12/14
11.	Daftar Riwayat Hidup	14/14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan untuk menjadi pemerintahan yang baik adalah terlaksananya urusan dan tugas pemerintah dengan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan mengenai urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan dari proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Otonomi daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan otonomi daerah. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah untuk menciptakan *good governance*, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi kriteria dari tujuan pelayanan publik serta upaya kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelolah urusan daerah memperlihatkan performa kinerja daerah.

Kinerja adalah hasil/*output* dari kegiatan/proses yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) yakni capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Pemeriksaan (*Auditing*) suatu proses sistematis untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan serta menganalisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan menteri dalam negeri No. 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan merupakan proses kegiatan dan pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada umumnya diarahkan agar sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Adanya proses kegiatan pengawasan dapat mencapai target dan tujuan organisasi yang telah di rencanakan dengan efektif dan efisien.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Undang-undang Nomor 15 Pasal 1 Tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, auditor sebagai pihak independen dan diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2008).

Pemeriksaan kepatuhan dilaksanakan untuk mengetahui apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley Loebbecke, 2014 : 33).

Penelitian ini untuk mengetahui secara terperinci mengenai pemerintah daerah terkait peringkat dan status kinerja pemerintah serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari temuan audit seperti kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan untuk Kabupaten/Kota Banten. Kinerja pemerintah menjadi semakin berpengaruh untuk menghadapi perkembangan dunia saat ini, dengan pemeriksaan dan pengawasan keuangan dapat diperoleh informasi penting mengenai efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Banten)”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten?
2. Bagaimana pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten?
3. Bagaimana pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan maka peneliti membatasi masalah yang akan di teliti yaitu mengenai pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten tahun 2010-2014.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu : “Bagaimana pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi akademisi, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

2. Bagi peneliti, sebagai pengalaman yang berharga karena penulis memperoleh gambaran langsung dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Banten, memberikan tambahan informasi mengenai pemeriksaan, pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.
4. Bagi Pembaca, memberikan gambaran tentang pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten, dan informasi yang bermanfaat yang akan digunakan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2014). *Auditing dan Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta : Salemba Empat.

Arifianti Hermin, Payamta dan Sutaryo. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Kinerja Penyelenggaraan Daerah di Kabupaten/Kota Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 16*, 25-28 September, Manado : Universitas Sebelas Maret.

Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Baskara Adi Nugraha. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Kinerja Penyelenggaraan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatra*. Skripsi. Surakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Chabib Soleh dan Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung : Fokus Media.

Darwanis Sephi Chairunnisa. (2013). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Telaah & riset akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm. 150-174
Malaysia : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Duwi Priyatno. (2016). *SPSS Handbook. Analisis Data Olah Data, dan Penyelesaian Kaus-kasus Statistik*. Jakarta : Media Kom.

Hendrianto, Popi Fauziah dan Ethika. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatra*. Jurnal Nasional ISSN 4849-17031 Sumatra Barat : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta.

Hery. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi 1)*. Jakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).

IBK Bayangkara. (2011). *Audit Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.

Indra Bastian. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

Indra Bastian. (2014). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.

Irham Fahmi. (2010). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.

Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan praktik)*. Rajawali Press. Jakarta.

Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. (2015). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. e-Journal (Volume 3 No.1 Tahun 2015)*. Buleleng : Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

Manuel Pedro Rodríguez Bolívar , Laura Alcaide Munoz dan Antonio M. Lopez Hernandez. (2013). *Determinants of Financial Transparency in Government. International Public Management Journal. England : University of Granada*.

Moheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mulyadi. (2014). *Auditing 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Liberty.

Norazlina Ilias, Nik Kamaruzaman Abdulatiff dan Nafsiah Mohamed. (2015). *Management Control System and Performance: Accountability Attributes in Local Authorities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(S4) 26-35*. Malaysia : School of Accountancy, College of Business, Universitas Utara Malaysia, Malaysia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

_____. Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nomor 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Rahmadi Murwanto, Adi Budiarmo, Fajar Hasri Ramadhan. (2011). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pengembangan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Sarwoto. (2012). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum. (2013). *Auditing*. Jakarta : Media Bangsa.

Siswandi dan Indra Iman. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wicana Media.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sukrisno Agoes, (2012). *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Nomor 15 Pasal 4 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksaan Keuangan.

Nomor 15 Pasal 9-10 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksaan Keuangan.

Nomor 15 Pasal 16 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksaan Keuangan.

_____ Dasar Pasal 23 Tahun 1945 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

_____ Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2004 Tentan Perbendaharaan Negara.

Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Depok : Jurnal Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Wirawan.(2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://www.bpk.go.id>

<http://www.kemendagri.go.id>

<http://www.banten.go.id>

<http://www.lebakkab.go.id>

<http://www.pandeglang.go.id>

<http://www.serangkab.go.id>

<http://www.tangerangkab.go.id>

<http://www.cilegonkota.go.id>

<http://www.tangerangkota.go.id>